

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN DENGAN DIMODERASI OLEH VARIABEL KOMITMEN ORGANISASI DAN INFORMASI ASIMETRI

Restu Agusti

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran terhadap Sennjangan Anggaran dimoderasi oleh Komitmen Organisasi dan Informasi Asimetri pada Aparat Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis linear berganda berdasarkan 82 unit kuesioner yang berhasil dikumpulkan dari Pejabat Eselon II, II dan IV pada unit-unit Pemerintahan Kota Pekanbaru. Hasil pengujian menemukan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi variabel senjangan anggaran, begitu juga variabel komitmen organisasi dan Asimetri Informasi berhasil mempengaruhi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran.

Kata kunci : Kesenjangan Anggaran, Kejelasan sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi dan Asimetri Informasi.

PENDAHULUAN

Penerapan Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 memberikan implikasi yang sangat luas bagi otonomi daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban vertical kepada Pemerintah Pusat ke pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat melalui DPRD.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Mardiasmo (2002) mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien (Schief dan Lewin, 1970; Welsch, Hilton, dan Gordon, 1996 dalam Ikhsan dan Ane, 2007). Selain itu, anggaran juga merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Kenis (1979) terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Kejelasan sasaran anggaran mencakup luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan

jelas sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah serta mudah dipahami oleh siapa saja yang bertanggungjawab. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran (*budgetary slack*).

Locke (1968) menyatakan bahwa penentuan sasaran anggaran secara spesifik lebih produktif dibandingkan jika tidak ada penentuan sasaran. Hal tersebut akan mendorong karyawan untuk dapat melakukan yang terbaik. Beberapa penelitian lain juga menyatakan terdapat pengaruh yang positif tentang kejelasan dan spesifikasi *task-goal* terhadap komitmen pada sasaran, kepuasan dan pencapaian dari karyawan (Latham dan Yukl, 1975; Steers, 1976; Ivanchevic, 1976, dalam Darma, 2004).

Budgetary slack merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifnya ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kinerjanya. Hal ini menyebabkan perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik bagi organisasi. Prestasi kerja seorang pemimpin dalam konteks pemerintah cenderung dinilai dari prestasinya dalam mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Pada organisasi yang menilai kinerja berdasarkan pencapaian anggaran, pihak manajemen cenderung lebih banyak melakukan *budgetary slack*.

Sebagai akibat dari adanya *slack of budgeting* akan menimbulkan dampak negatif karena target yang akan dicapai menjadi mudah, sehingga akan mengurangi motivasi manajemen dalam mempertanggungjawabkan anggarannya.

Penelitian-penelitian mengenai hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran belum memberikan hasil yang konsisten. Penelitian Locke (1967), Kenis (1979), Darma (2004) dan Abdullah (2004) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja manajerial dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif. Namun sebaliknya, penelitian Jumirin (2001) dan Adoe (2002), menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan Suhartono dan Solichin (2006) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*).

Beberapa peneliti menggunakan variabel moderating untuk penelitian mengenai sistem pengendalian dan implikasinya. Seperti motivasi (Brownell dan Mc. Innes, 1986; Mia, 1988 dalam Darma, 2004; Fahrianta dan Ghazali, 2002; Riyadi, 1998; Lucyanda, 2001), *locus of control* (Brownell, 1982; Indriantoro, 2000), komitmen terhadap organisasi (Nouri dan Parker, 1996; Asnawa, 1997; Darlis, 2000), komitmen (Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002; Dwianasari, 2004), informasi (Charlos dan Poon, 2000), kultur organisasi (Connor, 1995), tekanan pekerjaan (Dunk, 1993a), dan lingkungan (Kren, 1992).

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Mowday et.al., 1979 dalam Suhartono, 2006). Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang merasa sasaran anggarannya jelas, akan lebih bertanggungjawab jika didukung dengan komitmen aparat yang tinggi terhadap organisasi pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang dicapai oleh organisasi sehingga akan mengurangi senjangan anggaran. Manajer yang memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi (Porter et.al., 1974 dalam Kurnia, 2004). Komitmen organisasi yang tinggi tidak akan menimbulkan senjangan (*slack*) (Darlis, 2000)

Young (1985) dan Merchant (1985) dalam Falikhatun (2007) menyatakan bahwa karena keinginan untuk menghindari resiko, bawahan yang terlibat dalam penyusunan anggaran cenderung untuk melakukan senjangan anggaran. Semakin tinggi resiko, bahwa yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran akan melakukan senjangan anggaran.

Penelitian mengenai pengaruh informasi asimetri terhadap senjangan anggaran telah banyak dilakukan. Dunk (1993) Dunk (1993) menyatakan bahwa informasi asimetri akan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi dan *budgetary slack*. Falikhatun (2007) juga membuktikan bahwa informasi asimetri berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap hubungan partisipasi dengan senjangan anggaran, namun sejauh pengamatan peneliti penelitian mengenai pengaruh informasi asimetri terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dan *budgetary slack* belum ada yang meneliti, oleh karena itu peneliti memasukkan informasi asimetri sebagai *variabel moderating* untuk mengetahui apakah dengan informasi asimetri akan berpengaruh dalam pengungkapan kejelasan sasaran anggaran terhadap *budgetary slack*.

METODE ANALISIS

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah yang ada dibawah naungan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemilihan Badan, dinas, dan kantor dilakukan dengan alasan yaitu instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang berarti menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pejabat setingkat Eselon III dan Eselon IV pada Dinas, Badan, dan Kantor Pemerintah Kota Pekanbaru.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung melalui responden atau sumber data asli dalam bentuk kuesioner. Dalam penelitian ini, kuesioner yang dikirimkan sebanyak 120 buah kuesioner. Masing-masing Instansi diberikan 5 kuesioner. Dan pada waktu dua minggu peneliti akan menjemput kembali kuesioner yang telah selesai dijawab pada setiap dinas, badan dan kantor. Kuesioner yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis untuk memperoleh keyakinan terhadap kevalidan atau tidaknya hasil yang diharapkan dengan mengeliminasi jawaban responden yang tidak memenuhi syarat sebuah kuesioner.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Senjangan Anggaran

Senjangan anggaran didefinisikan sebagai tindakan bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifnya ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kinerjanya. Hal ini menyebabkan perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai dengan estimasi terbaik bagi organisasi. Variabel senjangan anggaran diukur dengan instrument yang dibuat oleh Dunk (1993), dan digunakan oleh Darlis (2000), Rasuli (2002). Jumlah item pertanyaan adalah 7 item dengan skala Likert 1 (STS) sampai 5 (SS).

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Variabel kejelasan sasaran di ukur dengan menggunakan 3

pertanyaan yang dibuat oleh Kenis (1979) dan telah digunakan oleh Mardiasmo (2001), Darma (2004) dan Abdullah (2005). Variabel kejelasan sasaran anggaran di ukur menggunakan 3 pertanyaan, dimana skala rendah (1) menunjukkan rendahnya kejelasan sasaran anggaran dan skala tinggi (5) menunjukkan tingginya kejelasan sasaran anggaran.

3. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Variabel komitmen organisasi diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Meyer dan Allen (1984). Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah yang di kembangkan oleh Trisnaningsih (2003). Jumlah item pertanyaan adalah 12 item dengan skala likert 1 (STS) sampai 5 (SS).

4. Informasi Asimetri

Informasi asimetri merupakan suatu kondisi dimana adanya perbedaan informasi yang dimiliki bawahan dengan atasan. Informasi asimetri di ukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Dunk (1993) dan diadopsi oleh Wartono (1998) dengan 6 item pertanyaan menggunakan skala likert, yaitu 1 (STS) sampai 5 (SS).

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Uji validitas dalam penelitian ini melalui analisis butir-butir, dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid tidaknya suatu item dapat diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi pearson lebih besar dari 0.3 (Sugiyono, 2008;178) berarti instrumen penelitian itu valid.

Reliabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen sudah baik. Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat signifikansi 0,60 (Ghozali, 2006) sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliabel. Uji Alpha Cronbach untuk menguji reabilitas instrumen

G. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang dikemukakan diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 [(X_1 \times X_2)] + \beta_5 [(X_1 \times X_3)] + e$$

Keterangan:	Y	=	Senjangan anggaran
	β_0	=	Konstanta
	$\beta_{(1,2,3)}$	=	Koefisien regresi masing-masing X
	X_1	=	Kejelasan sasaran anggaran
	X_2	=	Informasi Asimetri

- X_3 = Komitmen Organisasi
- $[(X_1 \times X_2)]$ = Nilai interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan informasi asimetri
- $[(X_1 \times X_3)]$ = Nilai interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan statistik uji t. Uji t ini membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} yaitu bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti bahwa variabel bebas mampu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Responden

Dari kuesioner yang dikirimkan sebanyak 120 kuesioner, yang kembali sebanyak 82 kuesioner, 11 kuesioner tidak diisi dengan lengkap. Kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 71 kuesioner.

Dari 71 kuesioner yang diperoleh, berdasarkan jenis kelamin diketahui yang menjadi responden dalam penelitian ini umumnya laki-laki yaitu 59 orang (83,1%) dan perempuan 12 orang (16,9%), berdasarkan lama responden bekerja, yang bekerja 1-10 tahun 15 orang (21,13%), lama bekerja 11-20 tahun 33 orang (46,48%) dan diatas 20 tahun 23 orang (32,39%). Berdasarkan tingkat pendidikan responden, pendidikan SMU, 2 orang (2,82%), S1, 62 orang (87,32%) dan S2, 7 orang (9,86%). Responden dibagi dalam dua tingkat jabatan yaitu Eselon III sebanyak 58 orang (81,69%) dan Eselon IV sebanyak 13 orang (18,31%).

Pengujian Instrumen Penelitian

1.

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas instrumen memperlihatkan hasil yang cukup bagus (valid) dengan korelasi *pearson* diatas 0,3, dimana Koefisien korelasi antar butir pertanyaan berkaitan dengan variabel kejelasan sasaran anggaran dengan skor antara 0,784-0,876, variabel senjangan anggaran (*budgetary slack*) skor antara 0,461-0,823, variabel komitmen organisasi dengan skor antara 0,258-0,705, variabel informasi asimetri dengan skor antara 0,352-0,710.

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan taksiran batasan minimal 0,6 (Ghozali, 2006; 44). Hasil pengujian reliabilitas dari instrumen kejelasan sasaran anggaran, senjangan anggaran, komitmen organisasi dan informasi asimetri menunjukkan skor antara 0,636 – 0,797.

E. Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hasil analisis data untuk masing-masing hipotesis dapat dilihat pada tabel IV.11.

Tabel IV.11. Hasil Pengujian Data Masing-Masing Hipotesis

Hipotesis	R ²	F	Sig	t _{hitung}	t _{tabel}	Keoef β	Ket
-----------	----------------	---	-----	---------------------	--------------------	---------	-----

Hipotesis I	0.125	9.859	0.002	-3.140	1.99 5	0.354	X ₁
Hipotesis II	0.696	51.049	0.006	-2.826	1.99 5	2.134	[X ₁ x X ₂]
Hipotesis III	0.378	13.553	0.002	3.216	1.99 5	2.315	[X ₁ x X ₃]

Sumber : Data Olahan dengan SPSS

1 Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran pemerintah kota Pekanbaru. Hasil analisis regresi pada hipotesis pertama menunjukkan koefisien β_1 pada persamaan regresi pertama mempunyai pengaruh (mempengaruhi). Koefisien regresi sebesar 0.354 dengan signifikan p sebesar 0,002 sehingga p lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh terhadap senjangan anggaran.

Kenis (1979) menyatakan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Dengan kata lain jika suatu sasaran anggarannya sudah jelas maka senjangan anggaran (*budgetary slack*) tidak akan terjadi.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suhartono dan Solichin (2006), yang menyatakan bahwa variasi perubahan senjangan anggaran hanya bisa dijelaskan oleh variabel independen (kejelasan sasaran anggaran). Yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah, kabupaten, kota di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan dari penelitian ini adalah apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran pemerintah kota Pekanbaru.

Hasil analisis regresi pada hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa nilai p sebesar 0,006 p kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi mempunyai hubungan yang signifikan, ditunjukkan dengan koefisien β_2 sebesar 2,134. Dimana hasil menunjukkan bahwa:

$$t_{\text{hitung}} = -2,826$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,995$$

$$\text{ket} = \text{Ho ditolak}$$

Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran (*budgetary slack*) karena kriterianya $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,696 hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran dipengaruhi atau dimoderasi oleh interaksi komitmen organisasi sebesar 69,6%, sedangkan 30,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Pada konteks pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Adanya komitmen organisasi yang tinggi berimplikasi terjadinya senjangan anggaran dapat dihindari. Selain itu, komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan

Menurut Randal (1999) dalam Nouri Parker (1998) dalam Sardjito dan Muthaher (2007) mengemukakan komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam pencapaian kinerja yang diharapkan, komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhartono dan Solichin (2006) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderasi kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran (*budgetary slack*). Dengan kata lain komitmen organisasi juga mempengaruhi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin tinggi komitmen organisasi di Pemerintah Kota Pekanbaru maka semakin rendah pula senjangan anggaran pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang diajukan dari penelitian ini adalah apakah informasi asimetri berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran (*budgetary slack*).

Hasil analisis regresi pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa koefisien β_3 persamaan regresi (3) signifikan dengan nilai p sebesar 0,002 sehingga p kecil dari 0,05 ($p < 0,05$). Interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan informasi asimetri mempunyai hubungan yang signifikan, ditunjukkan dengan koefisien β_3 sebesar 2,315.

Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa informasi asimetri berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran (*budgetary slack*) karena kriterianya $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,378 menunjukkan bahwa hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran (*budgetary slack*) dipengaruhi atau dimoderasi oleh interaksi informasi asimetri sebesar 37,8% sedangkan 62,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Falikhatun (2007) menyatakan bahwa informasi asimetri sangat mempengaruhi partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Dengan kata lain, sebelum kita melakukan penyusunan anggaran kita perlu membuat suatu sasaran anggaran. Dengan jelas atau tidaknya sasaran anggaran yang diberikan akan membantu di dalam pelaksanaan anggaran itu sendiri. Dengan demikian informasi asimetri memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengungkapan kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*).

Dunk dalam Fitri (2004) mendefinisikan informasi asimetri sebagai suatu keadaan apabila informasi yang dimiliki bawahan melebihi informasi yang dimiliki atasannya, termasuk lokal maupun informasi pribadi. Informasi asimetri sangat mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran, karena semakin tinggi

informasi asimetri yang diberikan oleh bawahan atau pembuat anggaran maka kemungkinan terjadinya senjangan akan tinggi pula, dan sebaliknya.

Dengan kata lain informasi asimetri memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengungkapan kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran. Seorang bawahan apabila memberikan informasi yang bias kepada atasannya dalam membuat sasaran anggaran maka akan menimbulkan senjangan anggaran.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2004) yang menyatakan bahwa koefisien antara informasi asimetri dengan partisipasi anggaran menunjukkan bahwa setiap peningkatan partisipasi anggaran diikuti dengan penurunan informasi asimetri dan begitu pula sebaliknya. Demikian pula dalam penelitian ini, semakin meningkatnya kejelasan sasaran anggaran maka informasi asimetri akan menurun dan senjangan anggaran (*budgetary slack*) akan menurun pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah:

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak dinas sendiri, dan responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.
2. Ruang lingkup dalam penelitian ini sangat kecil. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dinas, badan dan kantor yang berasal dari pemerintah Kota Pekanbaru saja, yang mungkin saja hasilnya berbeda jika menggunakan sampel dan ruang lingkup yang lebih luas. misalnya pada pemerintah provinsi se-kabupaten dan kota.
3. Penelitian ini hanya menggunakan komitmen organisasi dan informasi asimetri sebagai variabel pemoderasi, sehingga mungkin masih kurang atau ada variabel lain lagi yang mempengaruhi hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran (*budgetary slack*).

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*), dimana komitmen organisasi dan informasi asimetri sebagai variabel *moderating*. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi variabel senjangan anggaran (*budgetary slack*). Pengujian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*) (negatif). Dengan kata lain, dengan adanya kejelasan sasaran anggaran akan mengurangi terjadinya senjangan anggaran (*budgetary slack*). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suhartono dan Solichin (2006) melakukan penelitian terhadap kejelasan sasaran anggaran dimana hasil dari penelitian tersebut adalah ditemukannya hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*).
2. Pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*), (negatif). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis kedua. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono dan Solichin (2006) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam memoderisasi kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*).

3. Pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa informasi asimetri berpengaruh (positif) terhadap hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis ketiga.
4. Prediktor senjangan anggaran (*budgetary slack*) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 12,5% dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, sebesar 69,6% hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan senjangan anggaran dimoderati oleh variabel komitmen organisasi, sedangkan 37,8% dimoderati oleh variabel informasi asimetri.
5. Dari seluruh pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semua variabel yaitu kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi dan informasi asimetri mempengaruhi hubungan terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*) Pemerintah Kota Pekanbaru.

Meskipun dalam porsi yang kecil, yaitu pada dinas, badan dan kantor yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru, namun hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami lebih komprehensif tentang bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*) dan juga bagaimana pengaruh dari variabel moderating yaitu komitmen organisasi dan informasi asimetri dalam pengungkapan pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran (*budgetary slack*).

Berhasilnya hipotesis yang disusun bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengevaluasi sistem organisasi yang ada guna meningkatkan efektifitas anggaran pemerintah. Dengan dimasukkannya variabel komitmen organisasi dan informasi asimetri sebagai variabel *moderating*, dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk benar-benar memperhatikan dinas, badan dan kantor yang ada di Kota Pekanbaru berkaitan dengan penganggaran.

Saran

Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu:

1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu di dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2. Untuk penelitian selanjutnya, agar ruang lingkupnya diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda. Misalnya penelitian pada pemerintah provinsi se-kabupaten dan kota serta dilakukan pada dinas, badan dan kantor yang lebih kompleks.
3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu memasukkan variabel lainnya yang mempengaruhi seseorang untuk menciptakan senjangan anggaran. Sehingga dapat diketahui bagaimana menciptakan kinerja yang lebih baik dan mengurangi terjadinya senjangan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2005. *Pengaruh Kejelasan sSasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Kompak, No. 13
- Anthony, R.N, Vijay Govindarajan. 202. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta
- Bastian, Indra, 2005. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Erlangga, Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, 1999. *Akuntansi Pemerointah Indonesia*. Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.
- Coryanata, Isma, 2007. *Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), SNA X, Makasar*.
- Darlis, Edvan, 2000, *Analisis Pengaruh Komitmen Organisational dan Ketidakpastian Lingkungan*

- terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *SNA IV*, Bandung.
- Darma, E.S, 2004 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah, *SNA VII*, Denpasar.
- Falikhatus, 2007, Informasi Asimetri, Budaya Organisasi dan Grup Cohesiveness dalam Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Budgetary Slack. *SNA X*, Makasar.
- Fitri, Yulia, 2004, Pengaruh Informasi Asimetri, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Timbulnya Senjangan Anggaran. *SNA VII*, Denpasar.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang, BBP UNDIP.
- Hansen dan Mowen, 2001, *Akuntansi Manajemen*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Ikhsan, Arfan, s007. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Menggunakan Lima Variabel Pemoderasi. *SNA X*, Makasar.
- Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grasindo, Jakarta.
- Kaloh, J, 2002, *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, edisi pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Munawar, 2006, Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Prilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang, *SNA IX*, Padang.
- Santoso, Singgih, 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- Siregar, Baldrik dan Boni Siregar, 1999, *Akuntansi Pemerintah dengan Sistem Dana*, edisi dua, STIE YKPN.
- Sugiyono, 2008. *Metodologi Penelitian bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, Ehrman, 2006, Pengaruh Kejelasan sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *SNA IX*. Padang.
- Ujiyantho, M, Arif. 2007. *Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu tujuan dalam Hubungan keagenan*
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Winaldy, Rafli, 2006, Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidapatian Lingkungan terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan senjangan Anggaran., *Skripsi UNRI*, Pekanbaru.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Visi Media Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Visi Media Jakarta.**